

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Perusahaan Sektor
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar
Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

NAHDYA MAULIDINI ADETYA
2017310646

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Nahdya Maulidini Adetya
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 04 Agustus 1999
N.I.M : 2017310646
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :

Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA

NIDN: 0731087601

Dosen Pembimbing

Tanggal :

(Dewi Murdiawati, S.E., MM)

NIDN: 0716118204

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019)**

Nahdya Maulidini Adetya

STIE Perbanas Surabaya

Email: Nahdyamaulidini99@gmail.com

Kec: Kebomas, Gresik

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of good corporate governance and corporate social responsibility on tax aggressiveness. The dependent variable used in this study is tax aggressiveness. The independent variables in this study are the audit committee, institutional ownership, managerial ownership, executive compensation, independent commissioners and corporate social responsibility. The population in this study are all infrastructure, utility and transportation companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The sampling method used in sampling was purposive sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS 24. The results of this study show that the audit committee, institutional ownership, managerial ownership, executive compensation and corporate social responsibility have no effect on tax aggressiveness while independent commissioners have an effect on tax aggressiveness.

Keyword: *Tax Aggressiveness, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Menurut UU nomor 28 tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Pajak menjadi peranan penting dalam suatu negara, karena pajak sebagai sumber keuangan utama. Sebagian besar transaksi yang dilakukan disetiap negara tidak luput dengan adanya

pajak. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar berasal dari kontribusi wajib pajak orang pribadi maupun badan terhadap pembayaran pajak. Peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangannya ekonomi. Mengatur mengenai system pemungutan pajak *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. *Self assessment* yaitu suatu system yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dari hal tersebut menimbulkan dampak yang rentan terhadap pelanggaran, penyelewengan dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak berupaya agar pajak yang diterima mencapai target yang telah ditetapkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan pemerintah yang menjadikan pajak sebagai pendapatan, bagi perusahaan pajak sebagai beban. Perusahaan berusaha agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Perusahaan berkewajiban untuk membayar pajak berdasarkan laba bersih. Semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung semakin besar begitu pula sebaliknya semakin kecil laba maka beban pajak yang ditanggung semakin kecil. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan ini dapat mendorong perusahaan untuk meminimalkan besaran pajak sehingga perusahaan cenderung dipandang telah melakukan tindakan agresivitas pajak. Fenomena yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Garuda Metalindo. Dalam laporan keuangan tahun 2015 PT. Garuda Metalindo terlihat bahwa terjadi peningkatan pada beban administrasi hingga meningkatnya utang bank senilai Rp. 48 miliar. Tidak hanya terjadi pada tahun 2015,

pada laporan keuangan tahun 2016 terdapat sumber pendanaan kegiatan operasional sebesar Rp. 200 miliar yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan. Modal yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan dimanfaatkan oleh PT. Garuda Metalindo untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang telah terdaftar sebagai badan usaha tetap ini menggantungkan hidup perusahaan dari pinjaman afiliasi yang mengakibatkan tingginya beban utang perusahaan (kompas.com diakses 26 Oktober 2020). Dengan meningkatnya beban utang, maka biaya bunga yang dibayarkan kepihak ketiga membuat jumlah pajak yang terutang menjadi rendah. Dalam fenomena tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dan menghindari pajak. Istilah lain dari penghindaran pajak adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan bentuk perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Frank et al., (2009) agresivitas pajak merupakan bentuk manipulasi pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Kedua upaya dalam agresivitas pajak tersebut dianggap memiliki kesamaan sebagai meminimalisir dan menghindari pajak yang dinilai sebagai sesuatu yang dapat merugikan negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak memberikan dampak terhadap menurunnya penerimaan pajak negara.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu selaku *principle* dan *agent*. Teori keagenan mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai. Teori keagenan akan muncul ketika terjadi sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Manajemen yang bertugas untuk mengelola perusahaan harus melaporkan kinerja perusahaan ke pemegang saham. Tujuan dari teori agensi ini adalah pertama, digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu baik *principle* atau *agent* dalam mengevaluasi keputusan yang diambil. Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil guna mempermudah pengalokasian hasil sesuai dengan kontrak kerja. Perusahaan yang semakin besar maka sering terjadi konflik perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent*. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan *agency problem*. Teori *agency* juga menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah dan manajemen. Dimana pemerintah yang menganggap pajak sebagai pendapatan negara, sedangkan perusahaan beranggapan pajak sebagai beban. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan manajemen dapat menimbulkan ketidaksimetrisan informasi yang mendorong manajer

untuk melakukan penghindaran pajak.

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dan manajemen. Asimetri informasi dapat memicu konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen dalam menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada pemegang saham, terutama tentang kinerja manajemen dalam perusahaan. Asimetri informasi ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka memanipulasi kinerja perusahaan. Sedangkan bagi pemegang saham, sulit untuk mengontrol secara efektif mengenai tindakan yang dilakukan manajemen karena sedikitnya informasi yang diterima. Adanya masalah keagenan yang dapat menimbulkan ketidaksimetrisan informasi, maka perusahaan harus menanggung besarnya *agency cost*. Praktik agresivitas pajak dalam teori keagenan dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen yang timbul ketika setiap individu berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang dikehendaki. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat mempengaruhi berbagai hal mengenai kinerja perusahaan terutama mengenai kebijakan pajak.

Pajak

Menurut UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sehingga pemungutan pajak harus terlebih dulu mendapat persetujuan masyarakat melalui DPR. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yaitu “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan pajak”. Menurut Soemitro, (1992) mendefinisikan pajak sebagai gejala masyarakat, yang artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Pungutan pajak yang dapat mengurangi kekayaan atau penghasilan setiap individu, namun hal tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat. Pengembalian itu dapat berupa melalui pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang memanfaatkan. Menurut Muriani, (2019) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk pengeluaran demi kemakmuran rakyat.

Agresivitas Pajak

Sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Bagi perusahaan pajak merupakan pengurang laba. Pada dasarnya perusahaan menekan laba agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Sebagian besar perusahaan

melakukan perencanaan pajak agar pajak yang dibayar rendah. Kegiatan perencanaan pajak itu sendiri memberikan manfaat terhadap pendapatan dan arus kas perusahaan, tetapi juga mungkin dapat menimbulkan biaya terkait yang mungkin lebih besar daripada manfaat yang didapat jika kegiatan penghindaran pajak terlalu agresif atau jika mereka muncul sebagai akibat dari manajerial insentif dan eksploitasi asimetri informasi yang merugikan pemegang saham (Ying et al., 2017).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan meminimalisir laba. Menurut Frank et al., (2009) agresivitas pajak merupakan bentuk manipulasi pajak penghasilan melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Manfaat yang paling jelas didapat perusahaan ketika melakukan agresivitas pajak adalah penghematan pajak yang lebih besar. Agresivitas pajak dilakukan dengan berbagai hal baik secara legal maupun illegal yang berdampak mempengaruhi penurunan penerimaan negara. System pemungutan pajak *self assessment* yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, maka seharusnya wajib pajak memperhitungkan dan membayarkan dengan benar. Hal ini tidak dilakukan oleh beberapa perusahaan, perusahaan justru memanfaatkan hal tersebut sebagai celah untuk melakukan perencanaan pajak.

Menurut Putri, (2014) tindakan pajak yang agresif akan berdampak buruk bagi perusahaan karena mengharuskan perusahaan untuk melaporkan laba lebih rendah. Hal ini tentu berdampak pada reputasi perusahaan yang dipandang memiliki kinerja yang buruk. *Stakeholder* selaku pemegang saham, kreditur dan investor tentu selalu menginginkan perusahaan untuk selalu mendapatkan laba yang tinggi. Menurut (Wahab et al., 2017) agresivitas pajak perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan karena kepentingan pemegang saham dan manajer tidak sejalan mengenai risiko pajak. Namun dalam kenyataan masih banyak perusahaan yang melaporkan laba tinggi kepada *stakeholder* tetapi melaporkan laba rendah kepada otoritas pajak.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu bentuk strategi perusahaan dalam menciptakan organisasi atau perusahaan untuk memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Menurut (Jamei, 2017) *corporate governance* merupakan konsep multidimensi dimana akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan pertimbangan keadilan dan hak para pemangku keadilan merupakan sebuah konsep mendasar. *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor. *Corporate givernance* berhubungan langsung dengan manajemen

perusahaan, dewan direksi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan bentuk dalam mengawasi, mengelola dan mengatur hubungan yang baik dengan pihak yang berhubungan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* memiliki kerangka kerja untuk menetapkan tujuan perusahaan serta memantau kinerja perusahaan.

Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari komisaris independen yang bertujuan untuk mengawasi jalannya kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Tan, (2006) menyatakan bahwa komite audit merupakan sub komite dari dewan direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. Komite audit mempunyai peran sangat penting dalam menjaga terwujudnya system pengawasan dalam melaksanakan *good corporate governance*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menjelaskan bahwa komite audit dalam suatu perusahaan minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan public atau emiten. Dengan adanya komite audit maka pengendalian terhadap perusahaan agar berjalan dengan baik, sehingga mengurangi terjadinya konflik keagenan. Dalam hal ini komite audit juga dapat menjadi penengah antara manajemen dan auditor.

Tugas komite audit yaitu menelaah dan memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian internal perusahaan yang sesuai dengan peraturan. Komite audit juga bertugas dalam memeriksa terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit harus independen. Menurut penelitian Deslandes et al., (2020) menyatakan bahwa independensi komite audit meningkatkan pemantauan informasi keuangan dan diperlukan untuk meminimalisir risiko pajak dan mengingat bahwa anggota komite audit non independen mungkin ingin meminimalkan pajak untuk meningkatkan laba bersih dan harga saham.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan yaitu institusi keuangan, pemerintah, institusi luar negeri, dan badan institusi lainnya yang dapat membantu pihak principle dalam mengawasi perilaku agen di perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan perusahaan. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal, karena kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk mendukung manajemen atau sebaliknya (Arianti, 2020).

Kepemilikan institusional dapat sebagai acuan dimana semakin tinggi presentase kepemilikan institusional perusahaan, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mengakibatkan adanya pengawasan oleh lembaga yang memiliki saham di perusahaan tersebut dengan mengawasi kinerja manajemen termasuk praktik agresivitas pajak. Institusi – institusi tersebut sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Kepemilikan institusional dinilai mampu mengurangi konflik keagenan yang muncul karena tidak adanya keselarasan antara principle dan agent di dalam perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya proporsi kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Fadhila et al., 2017). Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme dari *good corporate governance*. Dengan adanya kepemilikan oleh anggota dewan perusahaan dapat menciptakan insentif untuk melindungi kepentingan financial mereka di perusahaan (Boussaidi & Hamed, 2015). Dengan adanya kepemilikan saham, manajer akan secara langsung menerima manfaat dari keputusan yang telah diambil, begitu juga dengan kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Zahira, 2017). Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa manajer selaku pemilik saham lebih berhati-hati dalam mengambil

keputusan. Proporsi kepemilikan yang sedikit dalam perusahaan membuat manajer cenderung bertindak sesuai kepentingan pribadi dan tidak dapat memaksimalkan kinerja diperusahaan sehingga dapat menimbulkan *agency cost*. Menurut teori keagenan, konflik yang terjadi antara *principle* dan *agent* dapat dikurangi dengan menyelaraskan kepentingan antara *principle* dan *agent*. Keberadaan kepemilikan saham oleh manajerial dapat mengungsi timbulnya *agency cost* karena dengan memiliki saham perusahaan dapat merasakan secara langsung manfaat dan dampaknya dalam setiap pengambilan keputusan (Wirawan & Wirakusuma, 2018). Menurut Wijaya & Saebani, (2019) semakin besar proporsi saham manajerial dalam suatu perusahaan, maka pihak manajemen lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham dan cenderung meminimalisir risiko perusahaan. Sehingga perusahaan akan cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merupakan suatu insentif baik financial atau non financial yang diberikan perusahaan kepada jajaran eksekutif. Kompensasi ini diberikan sebagai balas jasa dan penghargaan untuk para eksekutif atas kinerja yang telah diberikan kepada perusahaan. Kompensasi ini juga diberikan agar eksekutif yang salah satunya manajer dapat meningkatkan kinerja mereka. Kompensasi dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus atau manfaat pribadi lainnya. Eksekutif yang menerima kompensasi tentunya

menginginkan agar perusahaan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014). Dari hal tersebut, eksekutif selaku pemimpin perusahaan membuat kebijakan pajak yang tentunya mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Maka dari itu kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif merupakan upaya sebagai pelaksanaan efisiensi pajak. Yuwono & Fuad, (2019) menjelaskan bahwa semakin besar kompensasi eksekutif perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang semakin kecil. Hal ini karena eksekutif membantu terciptanya hubungan yang searah antara *agent* dengan *principle*. Perusahaan tidak akan memberikan imbalan kepada para eksekutif jika biaya agresivitas pajak lebih besar dari keuntungan yang dihasilkan (Yuwono & Fuad, 2019).

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak netral yang keberadaannya diharapkan dapat meminimalisir tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Keberadaan komisaris independen di sebuah perusahaan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan agresivitas pajak atau tidak. Dalam perusahaan komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengontrol semua kebijakan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat mempengaruhi keputusan. Semakin banyak

komisaris independen dalam perusahaan maka pengawasan terhadap aktivitas agresivitas pajak semakin ketat. Komisaris independen merupakan peranan penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perpajakan. *Good corporate governance* menjadikan kinerja perusahaan menjadi lebih termonitoring. Selain itu, dengan adanya *good corporate governance* dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mendapatkan *value added* bagi pemegang saham.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility sebagai suatu komitmen yang dilakukan dalam dunia bisnis mengenai tanggung jawabnya secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Komitmen perusahaan dalam pengungkapan CSR dapat memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai akuntabilitas perusahaan. Peraturan mengenai CSR bagi badan usaha diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 66 C yang menyatakan bahwa laporan tahunan yang telah disampaikan kepada RUPS sekurang-kurangnya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawaban sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan kualitas perusahaan, mengurangi risiko bisnis perusahaan, mendapatkan izin beroperasi secara social serta memungkinkan perusahaan dalam mendapatkan penghargaan. Perusahaan yang melakukan CSR mendapat kepercayaan dan citra positif yang diberikan masyarakat serta investor. Kaitan teori dengan

penelitian ini adalah jika perusahaan melakukan CSR, maka perusahaan tersebut telah bertanggung jawab secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu perusahaan yang mengungkapkan CSR cenderung lebih berfokus pada reputasi perusahaan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Maka dari itu kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Menurut Nurcahyono & Kristiana, (2019) semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan, maka diharapkan perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Karena apabila perusahaan yang menerapkan CSR melakukan agresivitas pajak maka perusahaan tersebut dapat menurunkan nilai dan dampak positif dari pengungkapan CSR yang telah dilakukan perusahaan.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit merupakan upaya dalam mewujudkan *good corporate governance*. Komite audit yang mempunyai tugas dalam mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara *principle* dan *agent*. Dengan adanya komite audit diprediksi dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan antara pihak *principle* dan *agent*. Karena komite audit merupakan bagian komisaris independen yang diharapkan dapat menjadi penengah antara *principle* dan *agent*. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan dapat meminimalisir

tindakan penghindaran pajak. Meningkatnya kualitas *good corporate governance* dengan keberadaan komite audit yang besar dapat meminimalkan peluang perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka peneliti mengasumsikan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merupakan upaya dalam mewujudkan *good corporate governance*. Dengan adanya kepemilikan institusional pada perusahaan diharapkan dapat menjadi peranan penting dalam mengawasi dan memberi masukan kepada manajer. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang besar maka semakin meningkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap manajemen perusahaan. Teori keagenan muncul karena terjadi sebuah perjanjian bisnis antara *principle* dan *agent*. Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan dengan pihak *principle*. Oleh karena itu manajer berkewajiban untuk melaporkan informasi kepada *principle*. Namun, seringkali informasi yang disampaikan oleh manajer tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di perusahaan. Sehingga

konflik kepentingan yang terjadi antara pihak *principle* dan *agent* dapat menimbulkan *agency cost*. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan kepada manajerial (Fadli, 2016). Dari hal tersebut dapat mengurai konflik yang terjadi karena kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadinya agresivitas pajak. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Dalam mengambil keputusan pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati karena dampak yang terjadi dapat langsung dirasakan oleh dirinya selaku pemilik saham. Besarnya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan berdampak pada kelangsungan perusahaan. Berdasarkan teori *agency* yang menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat menimbulkan *agency problem*. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer yang mempunyai saham pada perusahaan berusaha menyelaraskan kepentingan dengan *principle* sehingga dapat mengurangi terjadinya *agency problem*. Dengan banyaknya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan diharapkan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Dari

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak

Kompensasi eksekutif merupakan imbalan yang diterima para eksekutif perusahaan atas loyalitas dan kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Imbalan ini juga diberikan agar para eksekutif dapat lebih meningkatkan kinerja mereka. Menurut teori keagenan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadi *agency problem* adalah dengan memberi aturan kepada *agent* agar bertindak sesuai dengan kepentingan *principle* dengan memberikan kompensasi. Kompensasi yang diberikan dapat berupa gaji, bonus dan saham. Kompensasi eksekutif berhubungan dengan agresivitas pajak dimana jika kompensasi yang diberikan tinggi, maka tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan rendah. Karena para eksekutif bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Dalam teori agensi yang menimbulkan perbedaan pandangan antara *principle* dan *agent* mengenai keputusan yang diambil. Kompensasi ini muncul sebagai *monitoring cost* yang dikeluarkan oleh *principle* untuk membatasi perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent*. Dalam teori agensi kompensasi yang diberikan *principle* kepada eksekutif

agar mereka dapat meningkatkan laba perusahaan.

H4: Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris independen merupakan pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan hubungan bisnis maupun keluarga dengan direksi, pemegang saham dan pihak dewan komisaris lainnya. Komisaris independen sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan diharapkan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja direksi. Tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perpajakan. Komisaris independen sangat berhubungan dengan teori agensi karena dengan adanya komisaris independen dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen. Komisaris independen memiliki hubungan dengan agresivitas pajak karena dengan adanya komisaris independen dapat mengawasi kinerja manajemen perusahaan serta dapat meminimalisir upaya memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

H5: Komisaris Independen berparuh terhadap Agresivitas pajak

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

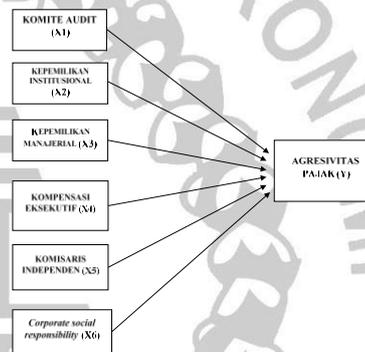
Corporate social responsibility merupakan bentuk kepedulian

perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat terhadap keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menyeimbangkan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan. Kinerja sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan pekerja, kinerja ekonomi dengan mengoptimalkan laba yang diperoleh, sedangkan kinerja lingkungan dengan memperdulikan lingkungan sekitar. Perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki tujuan untuk memberikan reputasi yang baik. Hal itu sejalan dengan teori agensi dimana *principle* selaku pemegang saham menginginkan agar perusahaan memiliki laporan yang baik dengan meningkatkan reputasi perusahaan dimasyarakat. Manajer sebagai *agent* mewujudkan tanggungjawab untuk memenuhi seluruh keinginan *principle* dengan melakukan pengungkapan CSR. Dari hal tersebut dapat menyelaraskan kepentingan antara *principle* dan *agent* sehingga dapat mengurangi *agency problem*. Pengungkapan *corporate social responsibility* berhubungan dengan agresivitas pajak karena CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial. Perusahaan yang mengungkapkan kewajiban CSR, dianggap bertanggung jawab secara sosial serta memiliki citra baik dimata masyarakat. Selain kewajiban CSR, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak yang dilakukan secara sukarela sesuai nominal yang ditetapkan dan tidak berupaya untuk melakukan agresivitas pajak agar dapat menjalin hubungan baik dengan

pemerintah. Perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif maka dapat disebut perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial. Meskipun tindakan agresivitas pajak tidak melanggar hukum tetapi dapat merugikan lingkungan sekitar perusahaan.

H6: Corporate social responsibility berparuh terhadap Agresivitas pajak

Berdasarkan uraian diatas maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam menguji hipotesis penelitian kuantitatif lebih mengarah pada angka, mulai dari pengumpulan data serta penampilan hasil akhir. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diproyeksikan dengan komite audit, kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen dan *corporate social responsibility*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui telaah pustaka.

Identifikasi Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen dan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah agresivitas pajak.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal dan illegal maupun kedua-duanya (Yoehana, 2013). Menurut penelitian Rengganis & Putri, (2018) proyeksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yaitu *effective tax rate*. Berikut rumus perhitungan ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$$

Komite Audit

Komite audit merupakan komite tambahan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu mengawasi manajemen perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan serta memberi pandangan mengenai

kebijakan keuangan dan pengendalian internal (Asri & Suardana, 2016). Menurut peraturan yang ada, dalam suatu perusahaan minimal terdapat 3 anggota komite audit. Menurut Dewi, (2019) komite audit dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite audit dalam perusahaan}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak diluar perusahaan yang dapat membantu pihak *principle* untuk mengontrol perilaku *agent* dalam perusahaan (Mustalifah, 2018). Menurut penelitian Abidin et al., (2018) kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kep. Institusi} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial (Novitasari, 2017). Menurut penelitian Irwan Prasetyo & Pramuka, (2018) kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kep. Manaj} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif dapat diartikan sebagai penghargaan untuk para jajaran eksekutif agar meningkatkan kinerja mereka dan tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Septiana et al., 2018). Pengujian kompensasi eksekutif dalam

penelitian ini dilihat dari total kompensasi yang diberikan kepada eksekutif selaku komisaris dan direksi. Menurut penelitian Darmawati & Delfina, (2018) kompensasi eksekutif dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komp Eksekutif} = \text{Ln Total Kompensasi Eksekutif}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya serta dengan perusahaan itu sendiri. Menurut penelitian (Abidin et al., 2018) komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility merupakan penerapan struktur, system dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai nilai plus perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan peraturan (Abidin et al., 2018). Proyeksi yang digunakan untuk menghitung pengungkapan *corporate social responsibility* dari *Global Reporting Initiative (GRI) 4.0* dengan jumlah proyeksi sebanyak 91 item yaitu menggunakan dummy, poin 1 diberikan pada setiap indikator yang diungkapkan oleh perusahaan dan poin 0 untuk indikator yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Menurut penelitian Abidin et al.,

(2018) *corporate social responsibility* diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

CSRI_j : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum X_{yi}$: Nilai = 1 jika y diungkapkan, nilai = 0 jika y tidak diungkapkan

n_i : jumlah item perusahaan i, n_i = 91

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang mempunyai kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria sesuai dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang *representative*. Adapun kriteria pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* dengan data keuangan yang dibutuhkan selama tahun 2017-2019.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah pada *annual report* tahun 2017-2019.

4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2017-2019 karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan beban pajak.

Teknik Analisis Data

Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai-nilai statistik dari keseluruhan variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan tentang sebab akibat yang ditimbulkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda karena terdapat jumlah variabel independen yang lebih dari satu. Analisis regresi linier berganda yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak yang diukur dengan *effective tax rate*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Komite Audit

X_2 = Kepemilikan Institusional

X_3 = Kepemilikan Manajerial

X_4 = Kompensasi eksekutif

X_5 = Komisaris Independen

X_6 = *Corporate Social Responsibility*

e = Error

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan sudah memenuhi asumsi-asumsi dasar. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan kajian teori yang mana belum didasarkan pada fakta melalui data yang terkumpul. Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam penelitian. Pengujian hipotesis dapat diukur dengan uji f, koefisien determinasi dan uji t.

Gambaran Subjek Penelitian

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode selama tahun 2017-2019. Data penelitian ini diperoleh dari website *Indonesia Stock Exchange (IDX)* yaitu www.idx.co.id. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS 24 karena untuk

membantu dalam pembuktian hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil analisis statistic deskriptif dari masing-masing variabel pada penelitian ini:

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KA	61	3	4	3.16	.373
KI	61	.3739	1.0000 0	.717145	.15484
KM	61	.0000	.15073 5	.023763	.04527
KE	61	19.16 26	26.203 9	22.6511	1.4972
KI	61	.1666 7	.66666 7	.420843	.10288
CS R	61	. 0549 4	. 340659	.128265	.06478
ET R	61	.0017 08	.56753 7	.223297	.13450
Vali d	61				

Sumber: Hasil Output SPSS

Pada tabel memperlihatkan hasil analisis variabel komite audit selama periode 2017-2019. Nilai rata-rata variabel komite audit pada tahun 2017-2019 sebesar 3,16 atau tiga

orang dengan nilai std. deviasi sebesar sebesar 0,373. Hampir seluruh perusahaan sampel mempunyai jumlah komite audit lebih dari sama dengan rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang ada pada sampel sebagian besar sudah memenuhi ketentuan otoritas jasa keuangan melalui peraturan nomor 55/PJOK.05/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang menjelaskan bahwa komite audit dalam suatu perusahaan paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota.

Tabel menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional dengan nilai rata-rata pada tahun 2017-2019 sebesar 0,7171 atau 71,71% yang berarti bahwa berdasarkan sampel dari 100% saham yang beredar pada perusahaan terdapat 28,29% saham yang dimiliki oleh manajerial dan masyarakat. Nilai terendah kepemilikan institusional dimiliki beberapa perusahaan dengan nilai 0,3739 atau 37,39% dimiliki oleh PT. Terregra Asia Energy (TGRA). Nilai kepemilikan institusional tertinggi terdiri dari PT Jaya Trishindo (HELI) tahun 2017, PT Meta Epsi (MTPS) tahun 2018, PT Putra Rajawali Kencana (PURA) tahun 2019 dengan nilai 1,00 atau 100% yang berarti jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan sebesar 100% dari total saham yang beredar. Nilai standar deviasi sebesar 0,1548 yang lebih kecil dari nilai rata-rata berarti variasi

data dalam penelitian tergolong rendah atau homogen.

Tabel menunjukkan bahwa analisis statistik deskriptif variabel kepemilikan manajerial dengan nilai rata-rata pada tahun 2017-2019 sebesar 0,0238 atau 2,38% dengan standar deviasi sebesar 0,04527 yang berarti bahwa berdasarkan sampel dari 100% saham yang beredar pada perusahaan terdapat 97,62% saham yang dimiliki oleh institusional. Nilai terendah kepemilikan manajerial dimiliki beberapa perusahaan dengan nilai 0,0000 atau 0% yang terdiri dari PT. Cipta Marga Nusaphala Persada (CMNP) tahun 2017, PT. Nusantara Infrastruktur (META) tahun 2017, PT. Jaya Trishindo (HELI) tahun 2017-2018, PT. Jasa Armada Indonesia (IPCM) tahun 2017-2018, PT. PP Presisi (PPRE) tahun 2017, PT. Transcoal Pacific (TCPI) tahun 2018-2019, PT. Trimuda Nuansa Citra (TNCA) tahun 2018-2019, PT. Trada Maritime (TRAM) tahun 2018, PT. Inti Bangun Sejahtera (IBST) tahun 2018-2019. Nilai tertinggi dimiliki oleh PT. Terregra Asia Energy (TGRA) dengan nilai 0,1507 atau 15,07% yang berarti jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan sebesar 15,07% dari total saham yang beredar. Nilai standar deviasi sebesar 0,0452 yang lebih besar dari rata-rata yang diperoleh berarti variasi data dalam penelitian tergolong tinggi atau data heterogen.

Pada tabel memperlihatkan hasil analisis variabel kompensasi eksekutif selama periode 2017-2019. Nilai rata-rata variabel kompensasi eksekutif pada tahun 2017-2019 sebesar 22,651. Nilai maksimum dari variabel kompensasi eksekutif ini

sebesar 26,2039 senilai Rp 240.000.000.000 yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) pada tahun 2017, hal ini menunjukkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memberikan kompensasi paling baik kepada para eksekutif perusahaan daripada perusahaan yang lain selama periode penelitian. Nilai minimum dari variabel kompensasi eksekutif ini sebesar 19,1626 senilai Rp. 210.000.000 yang dimiliki oleh PT LCK Global Kedaton (LCKM) pada tahun 2017, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memberikan kompensasi terhadap eksekutif paling sedikit dibandingkan dengan perusahaan lainnya selama periode penelitian.

Pada tabel memperlihatkan hasil analisis variabel komisaris independen selama periode 2017-2019. Nilai rata-rata variabel komisaris independen pada tahun 2017-2019 sebesar 0,4208 atau sekitar 42,08% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,10288. Hal ini berarti dari 100% jumlah total dewan komisaris di dalam perusahaan diperoleh sampel penelitian sebesar 42,08%. Nilai ini juga menunjukkan rata-rata perusahaan sampel dikatakan baik karena rata-rata kepemilikan komisaris independen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan peraturan yang ada pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel menunjukkan hasil analisis variabel CSR selama periode 2017-2019. Nilai rata-rata variabel CSR pada tahun 2017-2019 sebesar 0,1282 atau sekitar 12,82% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,06478. Item pengungkapan CSR tertinggi dengan nilai 0,3406 dimiliki

oleh PT Adi Sarana Armada (ASSA) pada tahun 2018 yang berarti perusahaan mengungkapkan sebesar 31 item dari indeks 91 item. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan terhadap stakeholder dan masyarakat. Selain itu terdapat standar deviasi yang digunakan untuk mengukur jarak antara data satu dengan data yang lainnya senilai 0,0647. Berdasarkan tabel nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasi yang menunjukkan bahwa tingkat variasi data sangat rendah dan bersifat homogen.

Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menjelaskan sebab akibat yang ditimbulkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian analisis regresi linier berganda:

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	.815	.476
	Komite Audit	-.076	.045
	Kepemilikan Institusional	-.039	.165
	Kepemilikan Manajerial	.398	.502
	Kompensasi Eksekutif	-.020	.015
	Komisaris Independen	.357	.173
	CSR	-.210	.278

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil regresi tersebut maka dapat dirumuskan persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR = 0,815 - 0,076 (KA) - 0,039 (KI) + 0,398(KM) - 0,020(KE) + 0,357 (KI) - 0,210 (CSR) + e$$

Persamaan hasil regresi linier berganda diatas sebagai berikut:

1. Jika semua variabel dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka nilai dari ETR sebesar 0,815
2. Setiap kenaikan satu satuan unit komite audit akan menurunkan ETR sebesar koefisien regresi komite audit yaitu 0,076 dengan asumsi variabel independen selain komite audit dianggap konstan (tidak berpengaruh)
3. Setiap kenaikan satu satuan unit kepemilikan institusional akan menurunkan ETR sebesar koefisien regresi kepemilikan institusional yaitu 0,039 dengan asumsi variabel independen selain kepemilikan institusional dianggap konstan (tidak berpengaruh)
4. Setiap kenaikan satu satuan unit kepemilikan manajerial akan menaikkan ETR sebesar koefisien regresi kepemilikan manajerial yaitu 0,398 dengan asumsi variabel independen selain kepemilikan manajerial dianggap konstan (tidak berpengaruh).
5. Setiap kenaikan satu satuan unit kompensasi eksekutif akan menurunkan ETR sebesar koefisien regresi kompensasi eksekutif yaitu 0,020 dengan asumsi variabel independen selain kompensasi eksekutif

dianggap konstan (tidak berpengaruh).

6. Setiap kenaikan satu satuan unit komisaris independen akan menaikkan ETR sebesar koefisien regresi komisaris independen yaitu 0,357 dengan asumsi variabel independen selain komisaris independen dianggap konstan (tidak berpengaruh).
7. Setiap kenaikan satu satuan unit CSR akan menurunkan ETR sebesar koefisien regresi CSR yaitu 0,210 dengan asumsi variabel independen selain CSR dianggap konstan (tidak berpengaruh).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada variabel terikat untuk setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan uji statistic non parametrik *Kolmogorov Smirnov*, dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed) $\geq 0,05$* berdistribusi normal dan *Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$* tidak berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		61
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11973031
	Most Extreme Differences	
Absolute		.107
Positive		.107
Negative		-.078
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.079 ^c

Sumber: Hasil Output SPSS

. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari *Asymp Sig (2-tailed)* adalah $0,079 \geq 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari pengujian berdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi hubungan atau korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai $VIF \geq 10$ atau *tolerance* $< 0,1$ maka dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi begitu sebaliknya. Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Komite Audit	.947	1.055
Kepemilikan Institusional	.405	2.467
Kepemilikan Manajerial	.515	1.943
Kompensasi Eksekutif	.517	1.933
Komisaris Independen	.838	1.193
CSR	.821	1.218

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel menunjukkan hasil uji multikolinieritas bahwa nilai *tolerance* dari keseluruhan masing-masing variabel independen $\geq 0,10$ yaitu sebesar 0,947 (Komite Audit), 0,405 (Kepemilikan Institusional),

0,515 (Kepemilikan Manajerial), 0,517(Kompensasi Eksekutif), 0,838 (Komisaris Independen) dan 0,821 (CSR). Dari tabel 4.12 menunjukkan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada model regresi tersebut tidak mempunyai masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan uji glejser. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas begitu sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser:

Model	Sig.
1 (Constant)	.460
Komite Audit	.422
Kepemilikan Institusional	.989
Kepemilikan Manajerial	.664
Kompensasi Eksekutif	.751
Komisaris Independen	.710
CSR	.502

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari keseluruhan variabel memiliki nilai sig $\geq 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi linier. Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak autokorelasi dengan melakukan *run test*. Metode *run test* ini digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar residual. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ menyatakan bahwa nilai residual mneyebar secara acak dengan begitu dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dan sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak menyebar secara acak dan terjadi autokorelasi. Berikut merupakan hasil *output* dari pengujian autokorelasi:

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.01138
Cases < Test Value	30
Cases \geq Test Value	31
Total Cases	61
Number of Runs	32
Z	.131
Asymp. Sig. (2-tailed)	.896

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) $0,896 \geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai

residual menyebar secara acak dan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

1. Uji f

Uji statistik digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka semua variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
.225	6	.038	2.357	.043 ^b
.860	54	.016		
1.085	60			

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji f dapat dilihat bahwa nilai Sig 0,043 $\leq 0,05$. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa uji fit yang berarti bahwa semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2018) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai $R^2 = 0$ maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sedangkan apabila nilai $R^2 = 1$ maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.456 ^a	.208	.120	.1262068

Sumber: Hasil Output SPSS

Tabel berikut memperlihatkan bahwa nilai dari Adjusted R Square mendekati nol yaitu 0,120 atau 12%. Jika nilai R^2 mendekati nol maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cenderung rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Eksekutif, Komisaris Independen dan CSR dalam mempengaruhi agresivitas pajak sebesar 12% sisanya sebesar 88% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian ini.

3. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel independen secara individual atau secara partial dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai signifikansi masing-masing variabel $> 0,05$ berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1.711	.093
	Komite Audit	-1.702	.095
	Kepemilikan Institusional	-.237	.814
	Kepemilikan Manajerial	.794	.431
	Kompensasi Eksekutif	-1.327	.190
	Komisaris Independen	2.064	.044
	CSR	-.756	.453

Sumber: Hasil Output SPSS

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Dalam penelitian ini hipotesis pertama menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.17 nilai t pada variabel komite audit menunjukkan angka -1,702 dengan nilai signifikansi $0,095 > 0,05$. Dari hasil signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.17 nilai t pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan angka -0,237 dengan nilai signifikansi $0,814 > 0,05$. Dari hasil signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.17 nilai t pada variabel kepemilikan manajerial menunjukkan angka 0,794 dengan nilai signifikansi $0,431 > 0,05$. Dari hasil signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.17 nilai t pada variabel kompensasi eksekutif menunjukkan angka -1,327 dengan nilai signifikansi $0,190 > 0,05$. Dari hasil signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.17 nilai t pada variabel komisaris independen menunjukkan angka 2,064 dengan nilai signifikansi $0,044 \leq 0,05$. Dari hasil signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

6. Pengujian Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap

agresivitas pajak. Berdasarkan tabel 4.17 nilai t pada variabel CSR menunjukkan angka $-0,756$ dengan nilai signifikansi $0,453 > 0,05$. Dari hasil signifikansi lebih dari $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya bahwa variabel CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, komisaris independen dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Pengujian data dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji SPSS versi 24 untuk melakukan uji statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Hipotesis pertama ditolak yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Hipotesis kedua ditolak yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

3. Hipotesis ketiga ditolak yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
4. Hipotesis keempat ditolak yaitu kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
5. Hipotesis kelima diterima yaitu komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
6. Hipotesis keenam ditolak yaitu CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Keterbatasan

1. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan pengungkapan CSR sesuai dengan item indeks GRI G4 karena diukur berdasarkan persepsi masing-masing peneliti, sehingga pengungkapan CSR untuk indikator perusahaan yang sama dapat menghasilkan asumsi yang berbeda antar peneliti.
2. Informasi mengenai saham kepemilikan institusional pada laporan keuangan perusahaan yang kurang spesifik sehingga

terkadang perusahaan tersebut masih dalam satu perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan sampel.

3. Banyaknya sampel yang tidak mengungkapkan laporan keuangan dan mengalami kerugian yang harus dikeluarkan dalam kriteria sehingga mengakibatkan berkurangnya sampel penelitian.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memproyeksikan pengukuran tindakan agresivitas pajak untuk memperkuat temuan dalam penelitian selanjutnya dengan pengukuran selain *effective tax rate* misalnya dengan menggunakan *book tax difference* dan *cash effective tax rate*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain selain yang ada pada penelitian ini seperti hubungan politik, kepemilikan keluarga, dan kualitas audit karena nilai adjusted R² yang relatif kecil sehingga terdapat pengaruh variabel lain diluar model regresi pada penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian tidak hanya perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi namun dapat menambah jenis perusahaan lain sehingga sampel yang dihasilkan semakin banyak.

DAFTAR RUJUKAN

Abidin, M. Z., Askandar, N. S., & Afifudin. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi

Empiris Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*,7(3).

Arianti, B. F. (2020). The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Business Education*, 4(2).

Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100.

Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The Impact Of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context. *Asian Economic and Social Society*, 5(1), 1–12.

Darmawati, D., & Delfina, C. (2018). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*,937-932

Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2020). Audit committee characteristics and tax aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 3(2), 272–293.

Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap

- Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2).
- Fadhila, N. S., Pratomo, D., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 1803–1820.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1).
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan program spss*.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–14.
- Irwan Prasetyo, & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2).
- Jamei, R. (2017). Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(5).
- Muriani. (2019). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). *Skripsi*.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, 4(1).
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(4), 1–4.

- Nurchayono, & Kristiana, I. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 117–125.
- Putri (2014). Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2).
- Rengganis, R. M. Y. D., & Putri, I. G. A. . A. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 871–898.
- Septiana, Sofiaty, D., & Helliana. (2018). Analisis Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode Tahun 2010-2016). *Akuntansi Gelombang 2*.
- Tan, M. B. Y. T. M. S. M. (2006). Board Characteristics, Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals. *Pacific Accounting Review*, 18(2), 47–68.
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z.-M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*.
- Wijaya, D., & Saebani, A. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala*, 6(1).
- Wirawan, I. M. D. S., & Wirakusuma, M. G. (2018). Kepemilikan Manajerial Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Karakter Eksekutif Terhadap Risiko Pada Tax Avoidance. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 23(1).
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies. *International Journal of Accounting & Information Management*.
- Yoehana, M. (2013). Analisis pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). *Skripsi*.
- Yuwono, & Fuad. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1.
- Zahira, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1).

www.idx.co.id